



HASIL PENGADAAN LAHAN TAHUN LALU Lima RTHP Baru Segera Dibangun

YOGYA (KR) - Sedikitnya lima ruang terbuka hijau publik (RTHP) akan dibangun Pemkot Yogya sepanjang tahun ini. Kelima RTHP tersebut merupakan hasil pengadaan lahan yang sudah dilakukan pada tahun 2019 lalu.

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogya Suyana, pihaknya baru bisa mengerjakan RTHP jika status lahannya sudah menjadi milik pemerintah. "Ada lima RTHP yang akan kami bangun tahun ini, di antaranya di Kricak dan Karangajen. Pada tahun lalu, juga lima unit," jelasnya, Kamis (16/1).

Pengadaan lahan untuk RTHP menjadi kewenangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogya. Lahan tersebut sebelumnya berstatus milik warga yang diusulkan untuk dibeli oleh pemerintah. Setelah berhasil terbeli, maka diserahkan ke DLH untuk proses pemenuhan fasilitas. RTHP yang sudah terbangun pun pengelolaannya diserahkan ke masyarakat.

Suyana menjelaskan, fasilitas yang akan dibangun untuk RTHP selalu mempertimbangkan berbagai aspek. Terutama ramah bagi anak, lansia dan disabilitas. Beberapa fasilitas pendukung antara lain gazebo, taman, pergola, aneka permainan anak, bahkan hingga layanan wifi atau jaringan internet gratis. "Meski statusnya milik peme-

rintah namun kami serahkan pengelolaannya ke masyarakat setempat. Jadi warga harus ikut menjaga dan memanfaatkan sebaik-baiknya," imbuhnya.

Penambahan RTHP setiap tahun tidak bisa dilakukan dalam jumlah banyak. Hal ini karena mempertimbangkan kemampuan anggaran. Hingga saat ini, luasan ruang terbuka hijau di Kota Yogya baru mencapai 19 persen dari luas wilayah. Padahal angka ideal yang ditetapkan pemerintah pusat ialah 30 persen.

"Selain untuk kepentingan lingkungan hidup, keberadaan RTHP harapan kami bisa menjadi ruang bagi interaksi antarwarga," tandasnya.

Sementara Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogya Hari Setyawan, sebelumnya mengatakan pada tahun ini pihaknya merencanakan pembelian tiga lahan milik warga. Masing-masing berada di Pakuncen, Sorosutan dan Ngampilan. Seluruhnya untuk kebutuhan ruang terbuka hijau publik.

Pembelian lahan itu pun harus didahului pengajuan proposal dari pemilik lahan. Selanjutnya Pemkot akan melakukan appraisal independen guna menaksir harga lahan tersebut. Dalam proses pengadaan lahan, harga yang ditawarkan oleh pemilik kerap lebih tinggi dari hasil appraisal. (Dhi)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan			

Yogyakarta, 19 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005